

Peran Masyarakat dalam Berpolitik di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan

Natasha Putri Indah Sumahaf¹, Romi Mesra²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado
 Email: ¹20606060@gmail.com ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 02, 2025
 Accepted July 31, 2025
 Published July 31, 2025

Kata Kunci:

Partisipasi Politik,
 Masyarakat Desa,
 Toleransi Politik,
 Demokrasi Lokal,
 Pemerintahan Desa



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat dalam berpolitik di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan, dengan fokus pada bentuk-bentuk partisipasi politik, sikap toleransi terhadap perbedaan pilihan politik, dan keterlibatan dalam berbagai aktivitas politik di tingkat desa. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi dalam kegiatan elektoral, menunjukkan sikap toleransi yang kuat terhadap perbedaan pilihan politik, dan terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas politik baik formal maupun informal. Masyarakat menekankan pentingnya memberikan suara secara jujur untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, mampu memisahkan perbedaan politik dengan hubungan sosial kemasyarakatan, dan aktif melakukan kampanye tidak langsung melalui jaringan sosial. Sikap toleransi politik didukung oleh modal sosial yang kuat dan peran efektif tokoh masyarakat dalam menjaga harmoni sosial. Keberagaman bentuk partisipasi menunjukkan vitalitas demokrasi lokal yang substantif dan partisipatif.

Abstract

This study aims to analyze the role of the community in politics in West Poopo Village, Ranoyapo District, South Minahasa Regency, with a focus on the forms of political participation, tolerance towards different political choices, and involvement in various political activities at the village level. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through observation and in-depth interviews with the village community. The results show that the community has a fairly high level of political participation in electoral activities, shows a strong tolerance towards different political choices, and is involved in various forms of political activities both formal and informal. The community emphasizes the importance of voting honestly to produce quality leaders, is able to separate political differences from social relations, and actively conducts indirect campaigns through social networks. The attitude of political tolerance is supported by strong social capital and the effective role of community leaders in maintaining social harmony. The diversity of forms of participation demonstrates the vitality of substantive and participatory local democracy.

Keywords: Political Participation, Village Community, Political Tolerance, Local Democracy, Village Government

A. Pendahuluan

Partisipasi politik masyarakat merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi yang menjadi indikator kesehatan demokrasi di tingkat lokal. Menurut Huntington dan Nelson (1976), partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam

konteks desa, partisipasi politik masyarakat tidak hanya terbatas pada kegiatan pemilihan kepala desa, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam musyawarah desa, pengawasan pembangunan, dan perumusan kebijakan desa. Verba, Nie, dan Kim (1978) menjelaskan bahwa partisipasi politik di tingkat lokal memiliki karakteristik yang berbeda dengan partisipasi di tingkat nasional, karena melibatkan interaksi yang lebih intens antara masyarakat dengan elite politik lokal serta dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya setempat.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam implementasi demokrasi deliberatif, di mana masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa diselenggarakan dengan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas, yang memberikan legitimasi kepada masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Gaventa dan Barrett (2012) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat di level lokal dapat memperkuat akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, dalam praktiknya, tingkat partisipasi politik masyarakat desa masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi, kesadaran politik, serta pola kepemimpinan lokal yang ada.

Kabupaten Minahasa Selatan sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara memiliki karakteristik masyarakat yang majemuk dengan tradisi dan budaya lokal yang khas. Desa Poopo Barat di Kecamatan Ranoyapo merupakan salah satu desa yang mengalami dinamika politik lokal yang menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan peran masyarakat dalam berbagai aktivitas politik. Menurut Koirudin (2005), dinamika politik lokal di Indonesia pasca reformasi menunjukkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk, namun masih ditemukan berbagai hambatan struktural dan kultural yang mempengaruhi kualitas partisipasi tersebut. Oleh karena itu, memahami peran masyarakat dalam berpolitik di Desa Poopo Barat menjadi penting untuk mengidentifikasi pola partisipasi politik, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi terhadap pembangunan desa dan kualitas demokrasi lokal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji tentang partisipasi politik masyarakat di tingkat desa dengan berbagai fokus dan pendekatan. Penelitian yang dilakukan oleh Antlov (2003) tentang desa dan demokratisasi di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa dalam politik lokal dipengaruhi oleh struktur kekuasaan tradisional dan modern yang saling berinteraksi. Antlov menemukan bahwa meskipun terdapat kebijakan yang mendorong partisipasi, dalam praktiknya masih terdapat dominasi elite lokal yang membatasi ruang partisipasi masyarakat biasa. Sementara itu, Wijaya (2010) dalam penelitiannya mengenai partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa menemukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor sosialisasi, tingkat pendidikan, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Wijaya menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat cenderung bersifat mobilisasi daripada partisipasi aktif yang kritis dan konstruktif.

Lebih lanjut, penelitian Saputra (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa mengungkapkan bahwa selain faktor internal seperti kesadaran politik dan pengetahuan politik, faktor eksternal seperti kampanye politik, peran tokoh masyarakat, dan jaringan sosial juga memberikan pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat. Saputra menemukan bahwa di desa-desa dengan ikatan sosial yang kuat, tingkat partisipasi politik cenderung lebih tinggi karena adanya tekanan sosial dan norma kolektif yang mendorong keterlibatan politik. Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengkaji secara komprehensif bagaimana peran masyarakat dalam berbagai bentuk aktivitas politik di desa, tidak hanya terbatas pada pemilihan

kepala desa tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan, dan implementasi kebijakan desa di konteks spesifik wilayah Minahasa Selatan dengan karakteristik sosial budaya yang unik.

Meskipun berbagai penelitian telah dilakukan terkait partisipasi politik masyarakat di tingkat desa, masih terdapat kesenjangan pengetahuan yang signifikan terutama dalam memahami kompleksitas peran masyarakat dalam berpolitik di konteks lokal yang spesifik. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada satu aspek partisipasi politik seperti pemilihan kepala desa atau musyawarah perencanaan pembangunan, sementara peran masyarakat dalam berpolitik sesungguhnya mencakup spektrum yang lebih luas meliputi partisipasi dalam pengawasan, advokasi kebijakan, mobilisasi sosial, dan berbagai bentuk aktivitas politik informal lainnya. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan di wilayah Jawa dan Sumatera, sementara karakteristik sosial budaya masyarakat di Sulawesi Utara, khususnya di Kabupaten Minahasa Selatan, memiliki keunikan tersendiri yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks partisipasi politik di tingkat desa.

Lebih jauh lagi, penelitian-penelitian terdahulu belum secara mendalam menganalisis bagaimana interaksi antara faktor tradisional dan modern mempengaruhi peran masyarakat dalam berpolitik di desa. Di Minahasa Selatan, struktur sosial masyarakat masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan kepemimpinan adat, namun di sisi lain juga mengalami transformasi akibat modernisasi dan penetrasi teknologi informasi. Pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat Desa Poopo Barat menegosiasikan antara nilai-nilai tradisional dan tuntutan demokrasi modern dalam praktik politik mereka, serta bagaimana hal ini mempengaruhi efektivitas partisipasi politik, masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara komprehensif peran masyarakat dalam berbagai dimensi politik di Desa Poopo Barat dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya lokal yang spesifik.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan holistik dalam memahami peran masyarakat dalam berpolitik yang tidak hanya melihat partisipasi sebagai kegiatan formal dalam institusi demokrasi, tetapi juga mengeksplorasi berbagai bentuk peran politik informal yang dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari di desa. Penelitian ini mengintegrasikan analisis terhadap partisipasi dalam pemilihan kepala desa, keterlibatan dalam musyawarah desa, peran dalam pengawasan pembangunan, serta aktivitas politik informal seperti diskusi politik di ruang-ruang publik lokal, mobilisasi melalui jaringan sosial, dan penggunaan media sosial sebagai sarana artikulasi kepentingan politik. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kompleksitas peran politik masyarakat di tingkat desa yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam literatur partisipasi politik.

Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dengan mengeksplorasi bagaimana karakteristik sosial budaya masyarakat Minahasa Selatan, khususnya di Desa Poopo Barat, mempengaruhi pola dan dinamika peran masyarakat dalam berpolitik. Dengan menganalisis interaksi antara struktur sosial tradisional seperti sistem *mapalus* (gotong royong), peran *tonaas* (tokoh adat), dan nilai-nilai kultural Minahasa dengan sistem politik formal yang ada, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konteks lokal membentuk praktik politik masyarakat. Temuan penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori partisipasi politik dalam konteks Indonesia, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi perumusan kebijakan dan strategi pemberdayaan politik masyarakat yang lebih sesuai dengan karakteristik lokal dan budaya setempat.

Realitas politik di Desa Poopo Barat menunjukkan dinamika yang menarik dalam konteks partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas politik lokal. Sebagai bagian dari Kecamatan Ranoyapo, desa ini mengalami berbagai transformasi sosial politik terutama pasca

implementasi Undang-Undang Desa yang memberikan otonomi lebih besar kepada desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan. Dalam praktiknya, masyarakat Desa Poopo Barat memiliki peran yang beragam dalam politik desa, mulai dari keterlibatan aktif dalam pemilihan kepala desa, partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan, hingga pengawasan terhadap pelaksanaan program-program pembangunan desa. Namun demikian, tingkat dan kualitas partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas politik tersebut tidaklah seragam dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, status sosial ekonomi, serta kedekatan dengan elite politik lokal.

Fenomena menarik yang terjadi di Desa Poopo Barat adalah adanya pergeseran pola partisipasi politik masyarakat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan perubahan struktur demografi desa. Generasi muda desa mulai menunjukkan pola partisipasi yang berbeda dengan generasi tua, di mana mereka lebih aktif menggunakan media sosial untuk mengekspresikan pandangan politik dan melakukan mobilisasi, meskipun partisipasi mereka dalam forum-forum formal seperti musyawarah desa masih relatif rendah. Di sisi lain, kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti perempuan dan kelompok marginal masih menghadapi berbagai hambatan dalam berpartisipasi secara optimal dalam politik desa, meskipun secara formal mereka memiliki hak yang sama. Kondisi ini mencerminkan adanya kompleksitas dalam praktik politik di tingkat desa yang memerlukan pemahaman mendalam untuk dapat mengoptimalkan peran masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, partisipatif, dan akuntabel.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam peran masyarakat dalam berpolitik di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. Menurut Creswell (2014), pendekatan kualitatif merupakan metode yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau masalah kemanusiaan. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dinamika partisipasi politik masyarakat dalam konteks sosial budaya lokal yang spesifik, serta memahami perspektif dan pengalaman masyarakat dalam berbagai aktivitas politik di desa.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti dapat mengeksplorasi kompleksitas peran masyarakat dalam berpolitik yang tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga mencakup dimensi-dimensi informal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat desa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara mendalam sebagai instrumen utama untuk memperoleh informasi yang komprehensif tentang peran masyarakat dalam berpolitik di Desa Poopo Barat. Observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap berbagai aktivitas politik masyarakat, termasuk kegiatan musyawarah desa, diskusi politik informal di ruang-ruang publik, serta berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Menurut Sugiyono (2017), observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik lain, yaitu wawancara dan kuesioner, karena observasi tidak selalu dengan objek manusia tetapi juga objek-objek alam yang lain.

Observasi dalam penelitian ini bersifat partisipatif moderat, di mana peneliti terlibat dalam beberapa kegiatan masyarakat namun tetap menjaga jarak untuk mempertahankan objektivitas pengamatan. Selain observasi, wawancara mendalam dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari tokoh masyarakat, aparat pemerintah desa, dan masyarakat biasa yang dipilih secara purposive untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang peran, persepsi, dan

pengalaman mereka dalam aktivitas politik di desa. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif yang mengikuti model Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih hal-hal pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari hasil observasi dan wawancara yang telah dikumpulkan.

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode, di mana data yang diperoleh dari observasi dikonfirmasi dengan data wawancara, serta informasi dari satu informan diverifikasi dengan informasi dari informan lainnya. Proses analisis dilakukan secara berulang dan interaktif untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap data sesuai dengan realitas yang terjadi di lapangan dan dapat menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Politik Elektoral

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa Poopo Barat memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam kegiatan politik elektoral, baik di tingkat desa maupun nasional. Pengamatan di lapangan mengindikasikan bahwa menjelang pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah, terjadi peningkatan aktivitas politik di kalangan masyarakat yang terlihat dari intensitas diskusi politik di berbagai ruang publik informal seperti warung kopi, tempat ibadah, dan pertemuan-pertemuan kemasyarakatan. Masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam membahas calon pemimpin yang dianggap layak untuk memimpin, dengan beberapa warga bahkan mulai melakukan kampanye tidak langsung untuk pilihan mereka kepada keluarga dan tetangga. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik elektoral telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat desa dan menjadi topik yang menarik perhatian warga dalam interaksi sehari-hari mereka.

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu YAS



Sumber: Data Primer

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu YAS terungkap bahwa peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan politik di Desa Poopo Barat terutama terwujud dalam bentuk pemberian hak suara pada saat pemilihan umum. Informan menekankan pentingnya ikut serta dalam

memberikan hak suara secara jujur dan amanah agar penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya praktik-praktik yang merugikan seperti penyogokan atau *money politics*. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan suara dengan jujur mencerminkan pemahaman mereka bahwa partisipasi dalam pemilu bukan sekadar kewajiban formal, tetapi merupakan tanggung jawab moral untuk menghasilkan pemimpin yang peduli terhadap rakyat. Para informan mengungkapkan bahwa mereka aktif berpartisipasi dalam pencoblosan saat pemilihan kepala desa, kepala kecamatan, bupati, hingga pemilihan presiden, yang menunjukkan bahwa masyarakat memandang setiap tingkatan pemilihan sebagai kesempatan untuk menyalurkan aspirasi politik mereka.

Menariknya, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya perbedaan intensitas partisipasi berdasarkan tingkatan pemilihan, di mana pemilihan di tingkat lokal seperti pemilihan kepala desa cenderung mendapat perhatian dan partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan pemilihan di tingkat nasional. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat merasakan dampak langsung dari kepemimpinan di tingkat desa terhadap kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam proses pemilihan kepala desa. Namun demikian, menjelang pemilihan presiden, antusiasme masyarakat juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama karena pengaruh media massa dan media sosial yang gencar memberitakan dinamika politik nasional. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik elektoral ini tidak hanya terbatas pada pemberian suara, tetapi juga mencakup kehadiran dalam kampanye, mengikuti debat calon, dan melakukan sosialisasi politik di lingkungan mereka, yang menunjukkan bahwa politik elektoral telah menjadi bagian integral dari kehidupan politik masyarakat Desa Poopo Barat.

b. Sikap Toleransi Politik di Tengah Perbedaan Pilihan

Temuan penting dari penelitian ini adalah adanya sikap toleransi dan saling menghargai yang tinggi di kalangan masyarakat Desa Poopo Barat meskipun terdapat perbedaan pilihan politik di antara mereka. Hasil wawancara dengan Ibu FM secara konsisten menunjukkan bahwa masyarakat tetap menjaga sikap demokratis dan saling menghormati walaupun memiliki preferensi politik yang berbeda, khususnya menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Para informan menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi dan tidak seharusnya menjadi sumber konflik atau perpecahan di tengah masyarakat. Sikap toleransi ini mencerminkan kematangan politik masyarakat dalam memahami bahwa demokrasi memberikan ruang bagi setiap individu untuk memiliki dan mengekspresikan preferensi politik mereka sendiri tanpa harus memaksakan kehendak kepada orang lain.

Gambar 2. Wawancara dengan ibu FM



Sumber: Data Primer

Observasi di lapangan memperkuat temuan dari wawancara, di mana terlihat bahwa meskipun terjadi perdebatan dan diskusi politik yang cukup intens di antara warga yang mendukung calon berbeda, interaksi sosial mereka tetap berjalan harmonis dan tidak menimbulkan konflik horizontal. Masyarakat mampu memisahkan antara perbedaan preferensi politik dengan hubungan sosial kemasyarakatan yang telah terjalin lama. Dalam berbagai pertemuan kemasyarakatan dan kegiatan gotong royong, warga yang berbeda pilihan politik tetap bekerja sama dengan baik dan tidak membiarkan perbedaan politik mengganggu solidaritas sosial mereka. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan sosial dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Desa Poopo Barat cukup kuat untuk menjaga kohesivitas sosial di tengah dinamika politik yang terjadi, dan masyarakat memiliki mekanisme sosial budaya yang efektif dalam mengelola perbedaan politik tanpa harus mengorbankan kerukunan sosial.

Sikap saling menghargai perbedaan pilihan politik ini juga didukung oleh peran tokoh masyarakat dan pemuka agama yang secara aktif mensosialisasikan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan meskipun berbeda pilihan politik. Beberapa informan mengungkapkan bahwa dalam berbagai kesempatan, para tokoh masyarakat selalu mengingatkan warga untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan, dan untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan persaudaraan. Pendekatan kultural ini terbukti efektif dalam meredam potensi konflik politik di tingkat desa, karena masyarakat memiliki keterikatan emosional dan penghormatan yang tinggi terhadap tokoh-tokoh masyarakat mereka. Dengan demikian, meskipun kompetisi politik terjadi secara terbuka dan warga bebas mengekspresikan preferensi politik mereka, namun hal tersebut tidak mengancam harmoni sosial yang telah terbangun di masyarakat Desa Poopo Barat, dan justru menunjukkan bahwa demokrasi dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung tinggi persatuan dan toleransi.

c. Bentuk-Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Politik Desa

Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik di Desa Poopo Barat yang tidak hanya terbatas pada partisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai kegiatan politik lainnya di tingkat desa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ketika ada kegiatan politik yang dilaksanakan di desa, masyarakat menunjukkan respons yang positif dengan ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai bentuk kegiatan tersebut. Bentuk partisipasi yang paling menonjol adalah keterlibatan dalam pencoblosan saat pemilihan kepala desa, kepala kecamatan, dan bupati, yang menunjukkan tingkat kesadaran politik masyarakat yang cukup tinggi terhadap pentingnya memilih pemimpin di berbagai tingkatan pemerintahan. Masyarakat memandang kegiatan pemilihan ini sebagai momentum penting untuk menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan mereka di masa depan, sehingga mereka berusaha untuk hadir dan memberikan suara mereka dalam setiap penyelenggaraan pemilihan.

Observasi di lapangan juga mengungkapkan bahwa selain partisipasi formal dalam pemilihan, masyarakat Desa Poopo Barat juga terlibat dalam berbagai aktivitas politik informal yang memiliki signifikansi penting dalam dinamika politik lokal. Aktivitas-aktivitas tersebut meliputi kehadiran dalam sosialisasi program-program pemerintah desa, partisipasi dalam musyawarah desa untuk membahas rencana pembangunan, serta keterlibatan dalam diskusi-diskusi politik informal yang terjadi di berbagai ruang publik. Masyarakat secara aktif menggunakan kesempatan-kesempatan ini untuk menyampaikan aspirasi mereka, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, dan

memberikan masukan kepada pemerintah desa. Bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek politik yang pasif, tetapi juga sebagai subjek aktif yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan arah kebijakan di tingkat desa.

Temuan menarik lainnya adalah adanya peran kampanye tidak langsung yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dalam rangka mempengaruhi pilihan politik warga lain di desa. Beberapa warga yang memiliki keyakinan kuat terhadap calon pemimpin tertentu secara aktif melakukan sosialisasi dan persuasi kepada keluarga, tetangga, dan kenalan mereka untuk mendukung pilihan yang sama. Aktivitas kampanye tidak langsung ini dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari diskusi informal di pertemuan-pertemuan sosial, penyebaran informasi melalui media sosial, hingga pemberian argumentasi tentang keunggulan calon yang mereka dukung. Meskipun dilakukan secara tidak terorganisir dan tanpa afiliasi formal dengan tim kampanye, aktivitas ini memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi preferensi politik di tingkat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam berpolitik di Desa Poopo Barat sangat beragam dan dinamis, mencakup spektrum yang luas dari partisipasi formal dalam pemilihan hingga berbagai bentuk aktivitas politik informal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, yang kesemuanya berkontribusi terhadap dinamika politik lokal dan proses demokratisasi di tingkat desa.

2. Pembahasan

a. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Politik Elektoral

Tingginya partisipasi masyarakat Desa Poopo Barat dalam kegiatan politik elektoral sejalan dengan konsep partisipasi politik yang dikemukakan oleh Huntington dan Nelson (1976) yang mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara preman yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Dalam konteks desa, partisipasi elektoral merupakan bentuk paling fundamental dari keterlibatan politik masyarakat, di mana warga menggunakan hak pilih mereka untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan membuat kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Verba dan Nie (1972), partisipasi dalam pemilihan umum merupakan indikator penting dari kesehatan demokrasi, karena mencerminkan tingkat kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada. Antusiasme masyarakat dalam mendiskusikan calon pemimpin dan melakukan kampanye tidak langsung menunjukkan bahwa politik elektoral telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial mereka, bukan sekadar ritual formal yang dilakukan lima tahun sekali.

Temuan bahwa masyarakat lebih aktif dalam pemilihan di tingkat lokal dibandingkan tingkat nasional dapat dijelaskan melalui teori kedekatan (*proximity theory*) yang dikemukakan oleh Dahl (1967), yang menyatakan bahwa semakin dekat pemerintahan dengan rakyat, semakin besar kemungkinan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini terjadi karena masyarakat merasakan dampak langsung dari kebijakan dan kepemimpinan di tingkat lokal terhadap kehidupan sehari-hari mereka, sehingga mereka memiliki motivasi yang lebih kuat untuk terlibat dalam proses politik. Menurut Sutiyo dan Maharjan (2017), partisipasi politik di tingkat desa di Indonesia cenderung lebih tinggi karena adanya ikatan sosial yang kuat, pengetahuan langsung tentang kandidat, dan kepentingan yang jelas terhadap hasil pemilihan. Masyarakat Desa Poopo Barat menyadari bahwa kepala desa yang terpilih akan langsung mempengaruhi pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program-program pemberdayaan di desa mereka, sehingga mereka memiliki kepentingan yang nyata untuk memastikan pemimpin yang tepat terpilih.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan suara secara jujur dan menghindari praktik money politics mencerminkan adanya proses pembelajaran politik yang positif di kalangan masyarakat desa. Menurut Norris (2002), kesadaran politik dan integritas dalam berpartisipasi merupakan indikator dari kematangan demokrasi di tingkat lokal. Aspinall dan Sukmajati (2016) dalam penelitiannya tentang politik uang di Indonesia menemukan bahwa meskipun praktik money politics masih menjadi fenomena umum dalam pemilihan di Indonesia, terdapat segmen masyarakat yang semakin kritis dan menolak praktik tersebut karena kesadaran akan dampak negatifnya terhadap kualitas kepemimpinan dan pemerintahan. Sikap masyarakat Desa Poopo Barat yang menekankan pentingnya kejujuran dalam pemilu menunjukkan adanya internalisasi nilai-nilai demokrasi substantif yang tidak hanya memandang partisipasi sebagai tindakan prosedural, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal ini merupakan modal sosial yang penting bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan budaya politik yang lebih sehat di masa depan.

b. Sikap Toleransi Politik di Tengah Perbedaan Pilihan

Sikap toleransi politik yang ditunjukkan oleh masyarakat Desa Poopo Barat merupakan manifestasi dari apa yang disebut oleh Almond dan Verba (1963) sebagai budaya politik partisipan yang matang, di mana masyarakat tidak hanya aktif dalam politik tetapi juga memiliki sikap yang moderat dan toleran terhadap perbedaan. Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas (1996), kemampuan masyarakat untuk mempertahankan dialog dan menghargai perbedaan pendapat merupakan prasyarat penting bagi demokrasi yang sehat. Toleransi politik bukan sekadar sikap permisif terhadap perbedaan, tetapi merupakan pengakuan aktif terhadap legitimasi pandangan yang berbeda dan kesediaan untuk hidup berdampingan secara damai meskipun terdapat perbedaan fundamental dalam preferensi politik. Dalam konteks Desa Poopo Barat, sikap ini menunjukkan bahwa masyarakat telah mengembangkan pemahaman bahwa pluralitas politik adalah bagian natural dari demokrasi dan bukan ancaman terhadap kohesi sosial.

Kemampuan masyarakat untuk memisahkan antara perbedaan politik dengan hubungan sosial kemasyarakatan mencerminkan kuatnya modal sosial yang ada di desa tersebut. Putnam (1993) menjelaskan bahwa modal sosial yang kuat, yang ditandai dengan kepercayaan (trust), norma timbal balik (reciprocity), dan jaringan kewargaan (civic networks), dapat memfasilitasi koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama serta menjadi buffer terhadap potensi konflik. Varshney (2002) dalam studinya tentang konflik etnis dan komunal di India menemukan bahwa komunitas dengan ikatan sosial yang kuat cenderung lebih resilien terhadap konflik politik karena adanya institusi-institusi sosial yang menghubungkan berbagai kelompok dan memfasilitasi komunikasi lintas perbedaan. Di Desa Poopo Barat, ikatan sosial yang telah terbangun melalui berbagai aktivitas kemasyarakatan seperti gotong royong, kegiatan keagamaan, dan tradisi lokal berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga solidaritas masyarakat tetap utuh meskipun terdapat perbedaan preferensi politik.

Peran tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menjaga toleransi politik sejalan dengan konsep peace building dari bawah (bottom-up peace building) yang dikemukakan oleh Lederach (1997), di mana pemimpin informal di tingkat akar rumput memiliki peran krusial dalam mediasi konflik dan pemeliharaan harmoni sosial. Menurut Liddle (1996), dalam konteks Indonesia, tokoh-tokoh informal seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pemimpin masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam membentuk opini publik dan perilaku politik masyarakat, seringkali lebih besar daripada struktur formal pemerintahan. Geertz (1973) juga menjelaskan bahwa dalam masyarakat Indonesia, otoritas kultural seringkali lebih efektif dalam

mengatur perilaku sosial dibandingkan otoritas formal karena legitimasinya yang berakar pada nilai-nilai dan tradisi yang dihormati masyarakat. Efektivitas pendekatan kultural dalam menjaga toleransi politik di Desa Poopo Barat menunjukkan bahwa penguatan demokrasi di tingkat lokal tidak hanya memerlukan institusi-institusi formal yang kuat, tetapi juga perlu memanfaatkan dan memperkuat institusi-institusi informal dan kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam mengelola perbedaan dan memelihara harmoni sosial.

c. Bentuk-Bentuk Keterlibatan Masyarakat dalam Aktivitas Politik Desa

Keberagaman bentuk keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik di Desa Poopo Barat mencerminkan konsep partisipasi politik multidimensional yang dikemukakan oleh Verba, Scholzman, dan Brady (1995), yang menyatakan bahwa partisipasi politik tidak terbatas pada pemilihan umum tetapi mencakup berbagai aktivitas seperti keterlibatan dalam organisasi, komunikasi politik, dan aktivitas kampanye. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia, Antlov (2003) menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk mulai dari partisipasi dalam musyawarah desa, pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, hingga keterlibatan dalam implementasi program-program pembangunan. Keragaman bentuk partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai pemilih yang pasif, tetapi juga sebagai aktor politik yang aktif dalam berbagai tahapan proses politik dan pemerintahan di tingkat desa, dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi kebijakan.

Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik informal seperti diskusi politik dan musyawarah desa merupakan manifestasi dari demokrasi deliberatif di tingkat lokal. Menurut Mansbridge (1999), ruang-ruang diskusi informal memiliki fungsi penting dalam demokrasi karena memungkinkan warga untuk membentuk preferensi politik mereka melalui pertukaran informasi dan argumen dengan sesama warga. Hadiwinata (2004) menjelaskan bahwa dalam konteks Indonesia, ruang-ruang publik informal seperti warung kopi, tempat ibadah, dan pertemuan-pertemuan komunitas menjadi arena penting bagi artikulasi kepentingan dan pembentukan opini publik, terutama di tingkat lokal di mana akses terhadap media massa dan forum-forum formal mungkin terbatas. Partisipasi dalam forum-forum informal ini memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan pemahaman politik mereka, mengkritisi kebijakan pemerintah, dan membangun konsensus tentang isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi arah kebijakan dan pengambilan keputusan di tingkat desa.

Fenomena kampanye tidak langsung yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dapat dijelaskan melalui teori pengaruh interpersonal dalam komunikasi politik yang dikemukakan oleh Katz dan Lazarsfeld (1955) dalam konsep *two-step flow of communication*, di mana informasi politik tidak mengalir langsung dari media ke massa, tetapi melalui *opinion leaders* yang kemudian mempengaruhi orang-orang di sekitar mereka. Mutz (2006) menjelaskan bahwa komunikasi politik interpersonal memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pembentukan preferensi politik karena melibatkan kepercayaan personal dan dilakukan dalam konteks hubungan sosial yang telah terjalin. Dalam konteks Desa Poopo Barat, aktivitas kampanye tidak langsung ini mencerminkan adanya dinamika politik akar rumput yang organik, di mana warga yang memiliki keyakinan politik tertentu secara aktif berusaha memobilisasi dukungan dari jaringan sosial mereka. Menurut Eriyanto (2000), dalam konteks masyarakat Indonesia yang kolektivistik, pengaruh jaringan sosial dan tokoh-tokoh informal sangat signifikan dalam membentuk perilaku politik, seringkali lebih efektif daripada kampanye formal yang dilakukan oleh partai politik atau kandidat. Hal ini menunjukkan bahwa politik di tingkat desa tidak hanya berlangsung melalui jalur-jalur formal dan terstruktur, tetapi juga melalui dinamika sosial informal yang kompleks dan berakar dalam struktur sosial masyarakat, yang kesemuanya

berkontribusi terhadap vitalitas demokrasi lokal dan memungkinkan artikulasi kepentingan yang lebih inklusif dan partisipatif.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang peran masyarakat dalam berpolitik di Desa Poopo Barat Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki tingkat partisipasi politik yang cukup tinggi dan beragam dalam berbagai aktivitas politik di tingkat desa. Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada keterlibatan dalam pemilihan umum, tetapi juga mencakup diskusi politik informal, musyawarah desa, pengawasan pembangunan, serta kampanye tidak langsung melalui jaringan sosial. Masyarakat menunjukkan kesadaran politik yang tinggi dengan menekankan pentingnya memberikan suara secara jujur dan menghindari praktik money politics, yang mencerminkan internalisasi nilai-nilai demokrasi substantif. Temuan penting lainnya adalah adanya sikap toleransi politik yang kuat di kalangan masyarakat, di mana perbedaan preferensi politik tidak mengganggu harmoni sosial dan solidaritas kemasyarakatan yang telah terjalin. Hal ini didukung oleh modal sosial yang kuat dan peran efektif dari tokoh-tokoh masyarakat dalam menjaga kohesi sosial di tengah dinamika politik yang terjadi.

Keberagaman bentuk partisipasi politik masyarakat Desa Poopo Barat menunjukkan adanya vitalitas demokrasi di tingkat lokal yang tidak hanya bersifat formal-prosedural tetapi juga substantif dan partisipatif. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek politik yang pasif, tetapi sebagai subjek aktif yang berupaya mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan arah kebijakan di tingkat desa. Pola partisipasi politik yang beragam ini mencerminkan dinamika politik akar rumput yang organik dan berakar dalam struktur sosial serta nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Untuk mengoptimalkan peran masyarakat dalam berpolitik di desa, diperlukan upaya-upaya penguatan kapasitas politik masyarakat melalui pendidikan politik yang berkelanjutan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa, serta pelembagaan ruang-ruang partisipasi yang lebih inklusif yang memungkinkan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok perempuan dan generasi muda, untuk terlibat secara optimal dalam proses politik dan pemerintahan di tingkat desa.

E. Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Antlov, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. Singapore: NUS Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1967). The City in the Future of Democracy. *American Political Science Review*, 61(4), 953-970.
- Eriyanto. (2000). *Kekuasaan Otoriter: Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni*. Yogyakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Gaventa, J., & Barrett, G. (2012). Mapping the Outcomes of Citizen Engagement. *World Development*, 40(12), 2399-2410.
- Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law*

- and Democracy. Cambridge: MIT Press.
- Hadiwinata, B. S. (2004). *Politik Bisnis Internasional*. Yogyakarta: Kanisius.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge: Harvard University Press.
- Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications*. New York: Free Press.
- Koirudin. (2005). *Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia: Format Masa Depan Otonomi Menuju Kemandirian Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Lederach, J. P. (1997). *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
- Liddle, R. W. (1996). *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Sydney: Allen & Unwin.
- Mansbridge, J. (1999). *Everyday Talk in the Deliberative System*. In S. Macedo (Ed.), *Deliberative Politics: Essays on Democracy and Disagreement* (pp. 211-239). New York: Oxford University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Mutz, D. C. (2006). *Hearing the Other Side: Deliberative versus Participatory Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.
- Saputra, A. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 112-128.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Singapore: Springer.
- Varshney, A. (2002). *Ethnic Conflict and Civic Life: Hindus and Muslims in India*. New Haven: Yale University Press.
- Verba, S., & Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row.
- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. (1978). *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press.
- Wijaya, M. (2010). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 6(3), 245-258.